

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Salah satu konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas bagi penggunanya. Jika informasi dan laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunanya, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (yang selanjutnya disingkat SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara

tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Putriasri Pujanira , 2017).

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normative sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010) antara lain: (1) relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap, (2) andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netral, (3) dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan antar-periode dan antar unit-pemerintahan, (4) dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 537 LKPD Tahun 2016, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi, 272 dari 415 pemerintah kabupaten, dan 72 dari 93 pemerintah kota. Badan Pemeriksa Keuangan juga mengungkapkan 7.950 temuan yang memuat 12.168 permasalahan yang terdiri atas 6.053 permasalahan Sistem Pengendalian Intern dan 6.115 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan senilai Rp2,08 triliun (<http://www.bpk.go.id>). Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian kali ini populasi yang digunakan adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang kali ketujuh ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur berharap sedikitnya 60 persen kabupaten/kota sudah bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2014, dengan rincian 13 LKPD mendapat opini WTP dari BPKP, 11 LKPD lain memperoleh opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas), sementara LKPD dari 24 kabupaten/kota lainnya di Jawa

Timur memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan dua daerah lain penilaian LKPD-nya belum selesai (<http://www.jatimprov.go.id>).

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan *decision-usefulness theory* informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, *decision-usefulness theory* memberikan signal kepada para manajemen dalam penerapan suatu standar akuntansi yang berhubungan dengan kepentingan pengungkapan informasi akuntansi kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan yang dikaitkan melalui komponen *decision-usefulness theory*.

Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui predikat opini wajar tanpa pengecualian ini sangat erat hubungannya dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya para pegawai di lingkup

pemerintah daerah. Kompetensi SDM merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan maka sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini disebabkan karena nilai relevan dan reliabilitas membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan yang etis dan dapat menimbulkan konflik keagenan sesuai dengan *agency theory* sehingga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Kompetensi SDM diukur menggunakan beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam kompetensi SDM terdiri dari kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di bidang keuangan.

Berdasarkan penelitian Merlyn, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hasil penelitian ini berbeda dengan Putriasri (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan

yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (As Syifa Nurillah, 2014). Pengendalian internal wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, karena kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui penerapan pengendalian internal tersebut. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan maka salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan *agency theory*.

Sistem pengendalian internal diukur menggunakan beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terdiri dari integritas data, ketepatan input dan posting data, prosedur otorisasi dokumen transaksi, serta pembagian tanggung jawab.

Berdasarkan penelitian Desiana (2014) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hasil penelitian berbeda dengan Merlyn, dkk (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Rogers (1986) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau

khalayak mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain. Pendapat tersebut mengisyaratkan bagaimana teknologi informasi dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif, khususnya dalam menembus ruang dan waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya. Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh, seperti instrumental tools, atau dalam konteks teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan diantaranya komputer dan peranti pendukung lainnya. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*).

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (As Syifa Nurillah, 2014). Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan pendekatan *technology acceptance model* yakni manfaat TI dan persepsi kemudahan penggunaan TI mempengaruhi

sikap individu terhadap penggunaan TI. Selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-tugasnya, maka individu akan berniat untuk menggunakannya.

Pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari komputer dan jaringan internet.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Riedy (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hasil ini sangat berbeda dengan penelitian Merlyn, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2015 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan bahwa laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan *decision-usefulness theory*.

Penerapan SAP diukur menggunakan beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari PSAP No 1, PSAP No 2, PSAP No 3, PSAP No 4, PSAP No 5, PSAP

No 6, PSAP No 7, PSAP No 8, PSAP No 9, PSAP No 10, PSAP No 11 dan PSAP No 12.

Berdasarkan penelitian yang M. Ali, dkk (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan hasil ini sangat berbeda dengan penelitian Putriasri (2017) menyatakan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini penting karena adanya fenomena tersebut, selain itu juga karena adanya *research gap* pada penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk:

1. Menganalisis pengaruh dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
4. Menganalisis pengaruh dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Di harapkan dari penelitian ini akan memberikan berbagai macam manfaat yang akan di kembangkan dengan baik secara empiris, toeritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Emiten

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia dimasa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana

kepada pihak SKPD dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil peneliti ini dapat digunakan untuk acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan.

## 3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengaruh kualitas laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah.

## 4. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang prosedur atau cara untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian terdiri dari identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang gambaran subyek dan populasi penelitian serta aspek-aspek dan sampel yang nantinya akan dianalisis. Selain itu sub bab ini juga berisi tentang analisis data dan pembahasan yang dapat memecahkan masalah.

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, serta saran atau implikasi dari hasil penelitian.